

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1 Sejarah Provinsi Sumatera Utara

Nama Sumatera berawal dari keberadaan Kerajaan Samudera (letaknya di pesisir timur Aceh). Ibnu Batutah, petualang asal Maroko berkunjung ke negeri tersebut pada 1345. Dia melafalkan Samudera menjadi Samatrah. Lama kelamaan, Samatrah menjadi Sumatera dan tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis.

Provinsi Sumatera Utara terletak di pulau Sumatera dengan ibukotanya adalah Kota Medan. Berdirinya provinsi ini bertepatan pada tanggal 5 April 1948. Sumatera Utara berbatasan dengan Aceh di sebelah utara dan dengan Sumatera Barat serta Riau di sebelah selatan. Provinsi ini merupakan kampung halaman bagi suku Batak, yang hidup di pegunungan dan suku Melayu yang hidup di daerah pesisir timur.

Selain itu juga terdapat suku Nias di pesisir Barat Sumatera, Mandailing, Jawa dan Tionghoa. Pada masa pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra meliputi wilayah pulau Sumatera dengan dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>William Marsden, Fadjriah Nurdiarsih, "Sejarah Sumatera", Tim Komunitas Bambu, tanggal 14 Agustus, 2023, pukul 21.44 wib, [https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=2946](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=2946).

Sumatera Utara sebagai Provinsi dalam perkembangannya telah melewati proses yang sangat panjang. Dari satu periode ke-periode berikutnya dengan telah mengalami berbagai perubahan, baik yang berkaitan dengan wilayah, sistem dan strukturnya. Perubahan-perubahan itulah yang melahirkan sosok-sosok pemimpin Sumatera Utara sesuai dengan perkembangan sistem dan struktur pemerintahannya.

Sebagai salah satu bagian wilayah Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Sumatera Utara pada awalnya telah memiliki pemerintahan tradisional yang mempunyai peran penting terutama dalam hal meletakkan dasar-dasar pembagian wilayah maupun otonomi daerah. Kata Sumatera berasal dari gelar seorang raja yang bernama Sriwijaya Haji Sumatra bhumi yang berarti "*Raja tanah Sumatera*".<sup>22</sup>

## **2.2 Letak Geografis dan Demografis Sumatera Utara**

Letak geografis pulau Sumatera untuk wilayah sebelah utara berbatasan dengan teluk Benggala, untuk wilayah selatan berbatasan dengan selat Sunda. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan selat Malaka. Provinsi Sumatera Utara

---

<sup>22</sup>Citra Arniathy Laoli, "Tinjauan Historis Terhadap Sosok PR.Telaumbanua (Gubernur Sumatera Utara 1965-1967)", Undergraduate thesis, tanggal 14, Agustus, 2023 <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sumatra#:~:text=Kata%20yang%20pertama%20kali%20menyebutkan,ke%20China%20pada%20tahun%201017.>

berada pada titik koordinat: 3°30`-3°43`LU dan 98°35`-98°44`Bt dengan luas wilayah sekitar 265,10 km<sup>2</sup>, penduduknya mencapai 2.460.858 jiwa.<sup>23</sup>

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur di tengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0-12 persen seluas 65,51 persen seluas 8,64 persen dan di atas 40 persen seluas 24,28 persen, sedangkan luas Wilayah Danau Toba 112.920 ha atau 1,57 persen.

Kota Medan cenderung miring kearah Utara dengan berada di ketinggian 2.5-37.5 meter diatas permukaan laut. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 kabupaten, 8 kota, 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan/desa. Kota Medan menjadi tempat yang sangat strategis sebab berada di jalur pelayaran selat Malaka, dengan demikian kota ini menjadi tempat aksesnya kegiatan ekonomi domestik dan manca negara yang melalui selat Malaka.

Sebagai mana kota yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pusat manajemen pemerintahan, pusat jasa keuangan, pusat komunikasi, pusat perdagangan regional dan internasional serta lain sebagainya. Singkat cerita, sepertinya masyarakat yang tidak ingin jauh-jauh dari peradaban.

## SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>23</sup>Nizar Aldi, Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Medan Tahun 2022, detikSumut, tanggal 14, Agustus, 2023, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6098240/jumlah-dan-kepadatan-penduduk-di-kota-medan-tahun-2022-cek-di-sini#:~:text=Kota%20Medan%20merupakan%20ibu%20kota,858%20jiwa%20pada%20tahun%20ini.>

Berkembangnya seperti pola alami dimana makhluk hidup tidak dapat bergerak jauh dari sumber makanannya.<sup>24</sup>

Dinamika politik Kota Medan memiliki catatan yang cukup unik. Gejala itu dapat kita perhatikan dengan seksama pada pola persebaran domisili penduduk di Kota Medan yang membawa ciri khas dan identitas masing-masing. Perkembangan angka tingkat kelahiran dan kematian serta mobilitas penduduk merupakan kausalitas dari dampak dan arah kebijakan pembangunan yang langsung.<sup>25</sup>

Hal lain yang tidak bisa dipisahkan pada dinamika politik di Kota Medan adalah masih kuatnya pendekatan-pendekatan secara primordial yang kerap berselingkuh dengan tiga jalinan terlarang yakni hubungan antara penguasa, penguasa, dan premanisme dalam kontestasi politik.<sup>26</sup>

Demografis-politik adalah tentang hubungan antara aspek-aspek kependudukan, seperti jumlahnya, komposisinya, dan distribusinya, dengan pemerintah dan politik. Aspek-aspek kependudukan memberikan dampak keputusan politik dari pemerintah, di samping pemerintah dan elite politik juga bersifat aktif dalam “mempolitisasi” aspek-aspek kependudukan.

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

<sup>24</sup>Yulita Moliq Rangkuti, dkk., “*Sistem Informasi Geografis (SIG) Berdasarkan Klasterin : Kasus Penyebaran Covid-19 di Kota Medan*”, (Yogyakarta, Jejak Pustaka: 2022) hlm.7.

<sup>25</sup>Wahyu Ario Pratomo, dkk, “*Data Kependudukan Dalam Pemenuhan Fasilitas Sosial dan Ekonomi: Studi Kota Medan*”, (Medan, CV. Merdeka Kreatif Group: 2023), hlm. 2

<sup>26</sup>Budi Ali Mukmin, Muhammad Ridha Syafii Damanik, “Demografi Politik Sumatera Utara: Analisis Pilihan Politik Masyarakat Berdasarkan Persebaran Penduduk, Agama dan Etni Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 di Kota Medan”, *Jurnal Geografi*, Vol.10 No.2, 2020, hlm. 132

Selain itu, Iklim di Sumatera Utara termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin Passat dan angin Muson. Kelembaban udara rata-rata 78%-91 persen, curah hujan (800-4000) mm/ tahun dan penyinaran matahari 43 persen.

### 2.3 Sejarah Terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera

Bangsa Indonesia telah menempuh sejarah panjang yang sangat menentukan dengan upaya perjuangan yang berat dan kritis. Melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia memilih untuk bebas dari penjajahan. Selanjutnya, dimulailah upaya untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, menyelenggarakan pemerintahan serta membangun kehidupan berdasarkan kedaulatan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945.<sup>27</sup>

Tercatat dalam sejarah bahwa PKS, terlahir dari rahim gerakan dakwah Islam. Partai PKS terlahir dari gerakan reformasi 1998, dan dapat dikatakan PKS merupakan partai nasionalis. Pada tanggal 20 Juli 1998, PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmu di Isma'il.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan partai politik pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk

---

<sup>27</sup>Diunduh pada tanggal 28, Juli, 2023, pukul 19.01 wib, [https://repository.uin-suska.ac.id/16125/9/9.%20BAB%20IV\\_2018312KOM.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/16125/9/9.%20BAB%20IV_2018312KOM.pdf).

dapat ikut kembali di pemilihan umum berikutnya. Partai ini didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 7 Shafar 1423 bertepatan dengan 20 April 2002. Pusat partai berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Pada tanggal 21 Mei 2000, Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Presiden PKS dalam Munas I PK yang diselenggarakan di Hotel Bumi Wiyata, Depok. Ia menggantikan Nur Mahmudi Ismail yang kemudian menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Namun, PKS menghadapi tantangan dalam memasuki dunia politik karena adanya ambang batas dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang mencegah mereka berpartisipasi dalam Pemilu 2004.

Sejak didirikan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memiliki sejumlah presiden partai dengan nama-nama sebagai berikut:

1. Hidayat Nur Wahid (2002-2004)
2. Tifatul Sembiring (2004-2009)
3. Luthfi Hasan Ishaq (2009-2013)
- 4 Anis Matta (2013-2015)
5. Muhammad Sohibul Iman (2015-2020)
6. H. Ahmad Syaikhul (2020 – Sekarang)<sup>29</sup>

Diketahui, dalam SK DPP PKS Sumatera Utara berikut nama-nama pengurus baru PKS Sumut yang dilantik, di antaranya sebagai Majelis

---

<sup>28</sup> Di unduh pada tanggal 17, Agustus, 2023, pukul 01.13 WIB, <https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/DG48fsoBIx2MicawOtpj9zVH0W5mNLgTdKebCkr3XuQP1vyYnJ.pdf>.

<sup>29</sup> Profil dan Visi-Misi Fraksi PKS DPR RI, fraksi PKS, tanggal 17, Agustus 2023, <https://fraksi.pks.id/visi-dan-misi-fraksi/>.

Pertimbangan Wilayah (MPW) yaitu Ketua MPW Salman Alfarisi, Lc, MA, Sekretaris MPW Cecep Wiwaha, Ketua Komisi Organisasi dan Wilayah Amsal Nasution, Ketua Komisi Kebijakan Publik dan Kajian Strategis Sigit Pramono Asri, S.E, Ketua Komisi Ketahanan Keluarga Sutias Handayani, A.Md.

Sementara itu unsur Dewan Pengurus Wilayah yang dilantik:

1. Ketua DPW Dr. H. Usman Jakfar, Lc, M.A,
2. Sekretaris DPW Drs. Misno Adisyah Putra,
3. Wakil Sekretaris DPW: Ibnu Affan, S.T,
4. Bendahara DPW Dhiyaul Hayati, S.Ag., M.Pd.,
5. Wakil Bendahara DPW Rawati serta
6. Ketua Bidang Kaderisasi Hamzah Sagimun, Lc.
7. Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Irfa Halena,
8. Ketua Bidang Kepemudaan Syahrul Komara, S.T.P,
9. Ketua Bidang Kepanduan Zulfikar,
10. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada Wasis Wiseso Pamungkas, S.Pt,
11. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Syaiful Ramadhan,
12. Ketua Bidang Seni dan Budaya Adrossadeq, S.T,
13. Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Muhammad Taufik Nasution , S.H, M.H,
14. Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi, dan Lingkungan Hidup Jemy Sinarta Pohan,

15. Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial Candrasari,
16. Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah H. Hanafi,  
Lc.,
17. Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader  
Jamhur Abdullah, S.T.,
18. Ketua Bidang Ketenagakerjaan: Syahrul Idrus, Ketua Bidang Tani  
dan Nelayan: Ahmad Hadian,
19. Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa: Ismail,  
S.Hut,
20. Ketua Bidang Pembinaan Daerah yaitu Medan Ahmad Darwis,  
M.A., Deli Serdang Herwan Nafil, Serdang Bedagai dan Tebing  
Tinggi Saidul Akram, Batubara, Asahan, dan Tanjung Balai Andi  
Pranata, Labuhanbatu Raya Mustafa, S.E., Tapanuli Bagian  
Selatan Awaludin, Eks-Tapanuli Utara: Riduansyah, S.E.,  
Kepulauan Nias Ari Usman, Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat Andri  
Susilo, S.T., Pematangsiantar dan Simalungun Azmi Syahputra  
Hasibuan, S.E. dan Langkat dan Binjai Irvantra Padang, M.A.

Tekanan yang kuat untuk berperan aktif dalam upaya pembangunan negara mendorong Musyawarah Majelis Syukro XII Partai Keadilan pada tanggal 17 April 2003 untuk merekomendasikan penyatuan dengan kekuatan politik lain. Sebagai hasilnya, pada tanggal 20 April 2003, Partai Keadilan Sejahtera resmi dibentuk dengan mengadakan deklarasi yang dihadiri oleh sekitar 40.000 orang di Silang Monas Jakarta. DPP PKS berhasil melewati



verifikasi Depkumham pada tanggal 4 Juni 2003, dan satu bulan kemudian PK bergabung dengan PKS.

Disisi lain, dengan menjadikan Islam sebagai akidah, asas, dan berbasiskan moral, maka Partai Keadilan Sejahtera berkeyakinan dan ingin menegaskan bahwa secara internal-subjektif aktifitas politik adalah “ibadah”, yang apabila bertujuan untuk kemaslahatan umat, yang didasarkan pada niat dan keikhlasan untuk mencari ridha Allah Swt.

#### 2.4 Asas dan Visi-Misi PKS

Dalam pasal 2 pada Anggaran Dasar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara tegas menyatakan bahwa Islam menjadi asasnya. Mengenai Visi Partai Keadilan Sejahtera mempunyai 2 bagian terpenting yang meliputi: visi umum dan visi khusus. Visi umum Partai Keadilan Sosial ialah: *“Sebagai partai pendakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan umat dan bangsa”*.

Sedangkan Visi khusus dari Partai Keadilan Sejahtera adalah: *“Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani”*.

Visi ini mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai:

1. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam dengan harapan jalan keluar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kekuatan yang berubah-ubah dari nilai ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa dalam beragam bidang.

3. Kekuatan yang membentuk dan menggalang kerja sama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang *rahmatanlil' alamin*.
4. Sarana untuk perwujudan masyarakat madani di Indonesia.<sup>30</sup>

Adapun misi Partai Keadilan Sejahtera, yaitu:

1. Menyebarluaskan Dakwah Islam dan membentuk kader-kader dengan harapan pembawa perubahan (*anashirtaghyir*).
2. Mengembangkan lembaga-lembaga masyarakat yang Islami diberbagai bidang sebagai pusat solusi (*markaztaghyir*).
3. Membangun opini umum yang islami dan mendukung bagi penerapan ajaran agama Islam yang solutif dan membawa rahmat.
4. Menumbuhkan kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraanya.
5. Menegakkan perbuatan baik terhadap kekuasaan yang konsisten dan berkelanjutan dalam bingkai hukum dan etika Islam.
6. Membangun komunikasi serta silaturahmi, kerja sama dengan kalangan umat Islam untuk terwujudnya Ukhwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa

---

<sup>30</sup>M. Imaddun Rahmat, "*Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gudang Parlemen*", (Yogyakarta: LkiS, 2008), hlm. 306.

lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.

7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri Muslim yang tertindas.

Tujuan dengan di dirikannya Partai Keadilan Sejahtera ini, sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART, adalah “Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang di ridhoi Allah SWT dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## 2.5 Falsafah dan Ideologi PKS

Islam dan gerakan dakwah dapat disebut sebagai pembeda (*categorical distinction*) antara PKS dengan partai partai lain. Sebagai partai yang bercirikan keIslaman, PKS mendapatkan banyak kelebihan yang dimiliki dari partai lainnya. Kunci keberhasilan partai berbasis agama juga berkaitan dengan kemampuannya dalam menghindari popularitas antara tuntutan ideologis dari doktrin agama dan sekular.<sup>31</sup>

Memang tidak hanya PKS yang menjadikan Islam sebagai asas atau ideologinya, tetapi kelebihan dari partai ini ialah pada kemampuannya untuk menerjemahkan asas atau ideologi tersebut pada suatu strategi yang dijalankan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan, yakni gerakan dakwah.

---

<sup>31</sup>Dr. H. Moh. Rozaq Asyhari, S.H, M.H, “*Transformasi PKS Memenangkan Indonesia Merebut Masa Depan*”, (Ciputat, Titian Pena: 2022) hlm. 106, cetakan kedua.

Falsafah Dasar Perjuangan Partai dihadirkan dalam rangka mewujudkan komitmen kepeloporan PKS untuk terus bersyukur atas nikmat dan karunia Allah SWT kepada bangsa Indonesia dan untuk landasan perjuangan partai demi tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia. Menghadirkan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## 2.6 Tranformasi Tampilan Partai

Perubahan lambang pada PKS dari kotak ke bulat dan penggunaan pilihan warna orange. Ini menunjukkan semangat baru PKS, komitmen PKS dekat dan hangat dengan semua kalangan tanpa terkecuali. PKS tidak melakukan pergantian secara keseluruhan tetapi melakukan rejuvenasi, yaitu melakukan peremajaan lambang, supaya memiliki serta daya tarik pada tampilan yang berbeda dari sebelumnya.<sup>32</sup>

Lambang baru PKS ini menunjukkan karakter yang lebih *fresh*, *friendly* dan inklusif dengan tujuan menjadikan sebuah semangat dari PKS agar dapat diterima baik dari semua kalangan. Pemilihan warna orange dapat di artikan dengan cukup berani, seolah keluar dari corak PKS sebelumnya.

1. Warna orange pada lambang PKS yang baru melambangkan kehangatan, harapan, semangat kehidupan yang selalu optimis.

---

<sup>32</sup>Dr. H. Moh. Rozaq Asyhari, S.H, M.H, “*Tranformasi PKS Memenangkan Indonesia Merebut Masa Depan*”, (Ciputat, Titian Pena: 2022) hlm. 23, cetakan kedua.

2. Warna putih pada makna lambang PKS berarti bersih, tulus, suci, ikhlas serta mulia.
3. Warna hitam, bermakna kedisiplinan, kekuatan ketegasan, wibawa, kepastian, aspiratif, dan perlindungan. Warna merupakan sebuah subjek yang menjadi salah satu hal terpenting dalam mempengaruhi daya tarik. Warna memberikan sebuah getaran tertentu pada sebuah lambang.<sup>33</sup>

Sedangkan lambang PKS memiliki makna tertentu juga:

1. Padi yang berartikan persaudaraan, keadilan dan kesejahteraan.
2. Bulan sabit yang terdapat pada lambing dapat diartikan dengan keseluruhan dan kemenangan bagi agama Islam.
3. Lingkaran memiliki arti kesetaraan, keteraturan, persatuan dan kesatuan.

Logo baru yang tampilannya lebih menarik dan modis seharusnya meningkatkan kepercayaan diri pada kader dalam bergaul atau berbaur dengan masyarakat, tokoh, serta pejabat. Hal ini terjadi dikarenakan dapat memotivasi seluruh jajaran pada partai untuk sering bersilahturahmi dan membangun komunikasi yang baik pada kelompok masyarakat.

---

<sup>33</sup>Dr. H. Moh. Rozaq Asyhari, S.H, M.H, “*Transformasi PKS Memenangkan Indonesia Merebut Masa Depan*”, (Ciputat, Titian Pena: 2022) hlm. 24, cetakan kedua

## 2.7 Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Sarana Informasi PKS Terkini

Untuk melakukan sebuah komunikasi yang baik untuk kampanye pemilihan umum dewasa yang ditujukan bagi generasi milenial, banyak sosial media yang dapat digunakan sebagai sarana informasi politik dengan sangat menggantungkan diri pada kemajuan teknologi terkini. Media sosial bagi para pelaku politik dapat memberikan landasan informasi yang cepat, dan sesuai untuk mengetahui opini publik yang sedang *trending*.

Begitu pula dalam menciptakan opini publik dengan tujuan kepentingan politik tertentu. Opini publik yang dapat membangun dukungan kepada mereka, khususnya yang tengah berkampanye untuk menjadi wakil rakyat, maupun juga bagi negara, atau bahkan yang memiliki kedudukan tertentu.

Untuk melawan kepentingan penguasa yang sering kali mementingkan golongan dan kepentingannya sendiri, media sosial dapat berguna sebagai pendobrak suara bagi masyarakat bawah. Ini karena partisipasi sangat mudah dilakukan di ranah tersebut. Membagi informasi dan menciptakan konteks agar dibaca publik dapat dilakukan dengan tak terbatas dan pastinya cepat.

Cara ini juga dapat menjadi ajang perlawanan baru terhadap penguasa yang tidak mementingkan rakyatnya.<sup>34</sup>

Dengan demikian, media sosial diharapkan bisa menjadi saluran terbaik bagi informasi dua arah yang saling berkaitan antara penguasa dan

---

<sup>34</sup>Jerry Indrawan, dkk, "Instagram Sebagai Media Komunikasi Politik bagi Generasi Milenial", *ekspresi dan persepsi jurnal ilmu komunikasi*, Vol 6, No.1, 2023, hlm. 173.

masyarakat. Tanpa kehadiran internet, tidak akan ada media sosial yang mempermudah dalam berkomunikasi. Kolaborasi antar-keduanya membuat relasi yang seimbang untuk menyebarkan dampak dan pengaruh, khususnya dibidang komunikasi serta sarana informasi politik.

Penggunaan media sosial bagi sarana informasi politik mempunyai beberapa keuntungan yang krusial. Beberapa keuntungan tersebut adalah efektif, praktis, mudah, dan pastinya juga murah. Menggunakan media sosial dari sistem internet menunjukkan sebuah konsep kemudahan yang efektif, misalnya dengan sekali tekan tombol saja, pesan yang kita buat dapat tersebar dan terbaca keseluruhan dunia. Internet yang bersifat “banyak ke banyak” (*many to many*) adalah kekuatan platform ini untuk menyebarkan segala bentuk informasi ke banyak penerima (*receiver*).

Penghubung utama pada komunikasi dalam sarana informasi politik penguasa dan politisi saat ini adalah media sosial. Media sosial digunakan sebagai sarana penyampaian kebijakan publik, pernyataan politik, sampai komentar terkait peristiwa-peristiwa nasional atau internasional. Mudah akses dan biaya yang rendah menjadi alasan utama. Dari pada beriklan di media konvensional misalnya, atau juga mengadakan rapat-rapat luring di publik, media sosial menjadi tentu menawarkan keuntungan tersendiri.

Komunikasi politik melalui media arus utama sangat mahal. Komunikasi politik merupakan bahasa dari kegiatan politik yang bertujuan

untuk menyampaikan pesan-pesan yang bercirikan politik oleh pelaku politik kepada sasaran politik.<sup>35</sup>

Media tersebut juga tidak bisa bersifat dua arah atau hanya sentralistik saja. Namun, ketika media sosial dipakai sebagai peolehan dari sarana informasi politik ini, mereka akan mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Jangan lupakan juga cakupan media sosial yang besar bisa menjangkau siapa saja dan dimana saja.<sup>36</sup>

Setiap perlakuan pasti akan memberikan dampak bagi penggunanya, begitu pula dengan adanya kemajuan pada teknologi ini. Perkembangan yang pesat pada penggunaan media sosial yang marak ini memiliki dampak negatif juga bagi setiap kalangan serta golongan. Contoh nyata dari dampak negatif pada generasi muda ialah malasnya anak memba cabuku dan lebih mengandalkan google sebagai cara cepat menemukan jawaban, selain itu penyalahgunaan membagikan informasi yang tidak benar pada kalangan orangtua.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>35</sup>Marini Rehanisafira dan Afnita, "Pola Komunikasi Politik Pada Akun Media Sosial Instagram Dedi Mulyadi: Perspektif Sosiolinguistik", *jurnal ilmiah bina bahasa* , Vol. 14 No. 2, 2021, hlm. 152.

<sup>36</sup>Jerry Indrawan, dkk, "Instagram Sebagai Media Komunikasi Politik bagi Generasi Milenial", *ekspresi dan persepsi jurnal ilmu komunikasi*, Vol 6, No.1, 2023, hlm. 177.